

## **RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017**

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Inspektorat tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Periode tahun 2013-2018, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

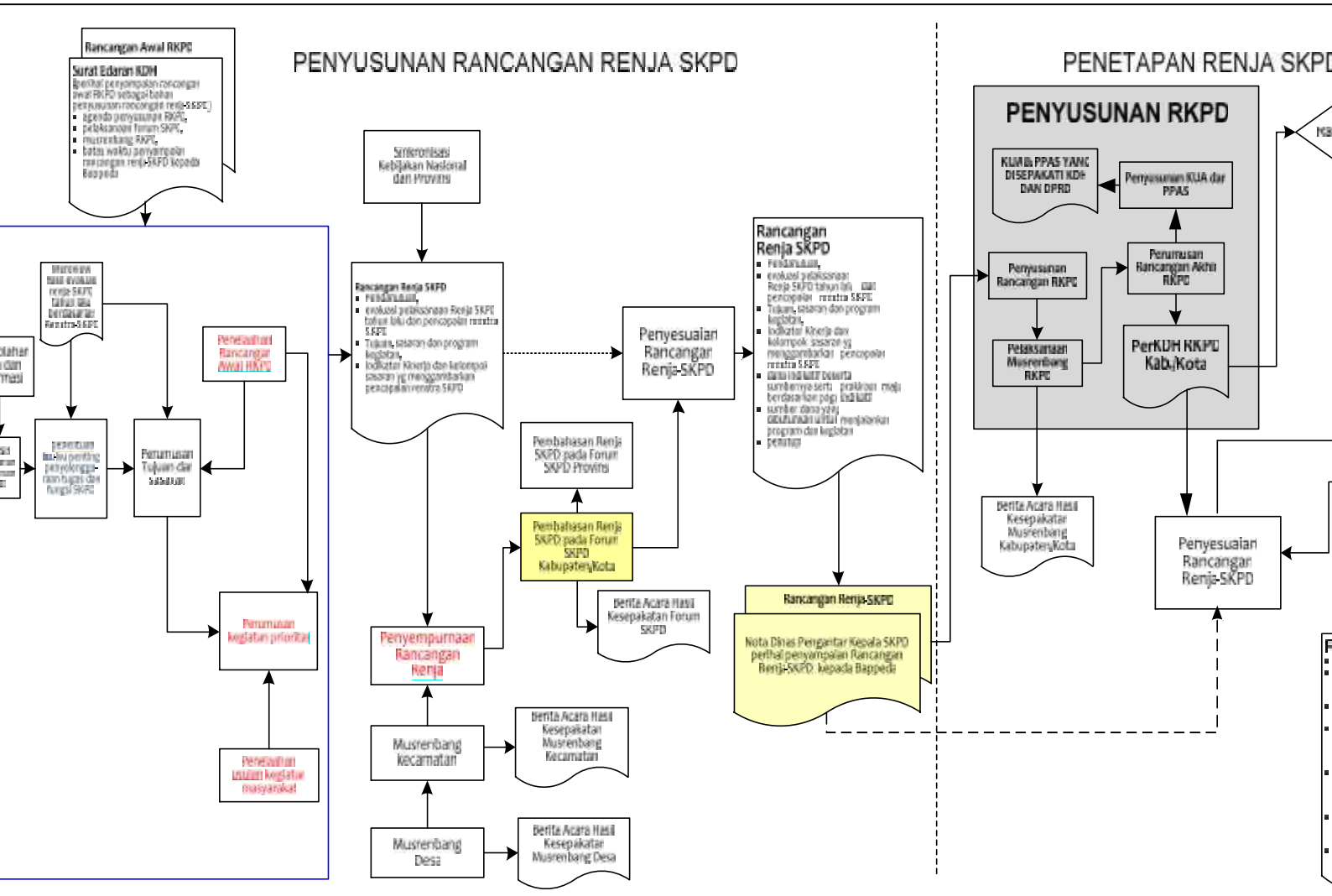
Salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh unit kerja di Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD

adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD.

Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2017 mengacu kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Inspektorat Kabupaten harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2016, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten.

Disamping mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor, Dokumen Renja juga berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 yang merupakan bagian integral dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Selain dari pada itu Renja SKPD tahun 2016 merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode masa jabatan 2013-2018 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. Untuk itu, proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga, sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja SKPD yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra SKPD dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Pada **Gambar 1** diperlihatkan alur penyusunan Renja.



Gambar 1.1 Penyusunan Renja SKPD

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 10);
  12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/75/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan satu tahun yang menjabarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, sebagai salah satu wujud dari proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah SKPD untuk melaksanakan kegiatan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai landasan/pedoman dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Bogor.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I       PENDAHULUAN

- 1.1   Latar Belakang
- 1.2   Landasan Hukum
- 1.3   Maksud dan Tujuan
- 1.4   Sistematika Penulisan

BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4   Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2   Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3   Program dan Kegiatan

BAB IV     PENUTUP

## **RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018**

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Memasuki tahun kelima perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra) PD 2013-2018, dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018.

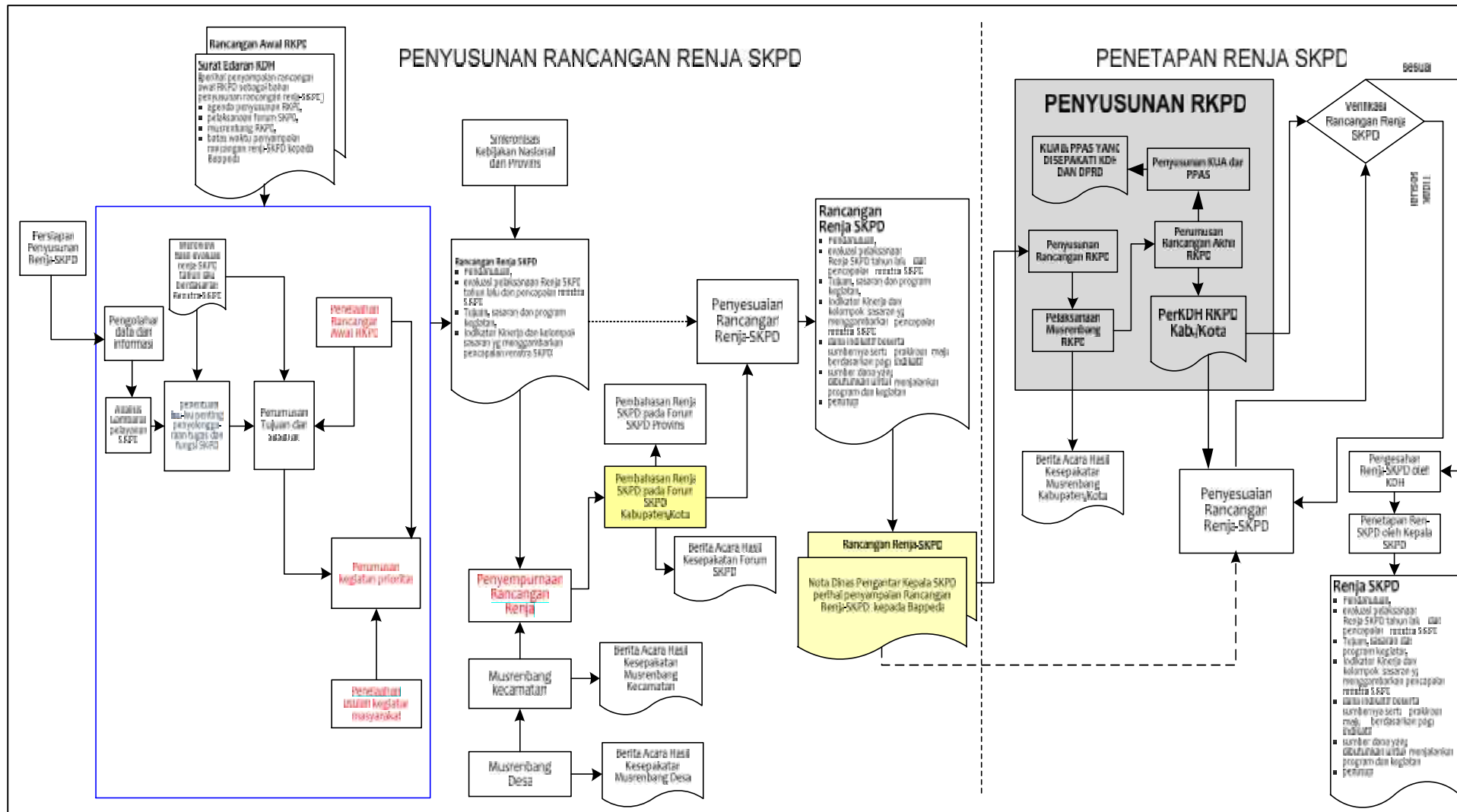
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Renja PD secara umum diatur dalam Pasal 273, dimana Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Disamping itu, rancangan Renja PD merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD, dan Renja PD ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah memberikan beberapa perubahan, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dibarengi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, terdapat kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan meskipun desa bukan merupakan daerah otonom. Lahirnya kedua Undang-Undang ini tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kewenangan PD dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yakni mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, penyusunan Renja PD tahun 2018 harus diarahkan pada upaya penuntasan visi tersebut. Hal lain yang perlu diintegrasikan adalah seluruh program/kegiatan yang menjadi bagian isi Renja PD harus diarahkan untuk mendukung tema, prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018 dan standar pelayanan minimal berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dokumen Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Pada **Gambar 1** diperlihatkan alur penyusunan Renja.





**Gambar 1.1 Penyusunan Renja SKPD**

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 10);
  12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/75/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan satu tahun yang menjabarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, sebagai salah satu wujud dari proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah SKPD untuk melaksanakan kegiatan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai landasan/pedoman dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Bogor.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I       PENDAHULUAN
  - 1.1   Latar Belakang
  - 1.2   Landasan Hukum
  - 1.3   Maksud dan Tujuan
  - 1.4   Sistematika Penulisan
  
- BAB II      EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
  - 2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
  - 2.2   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  - 2.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - 2.4   Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
- BAB III     TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
  - 3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
  - 3.2   Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3   Program dan Kegiatan
  
- BAB IV      PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN LALU**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Pelaksanaan kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 terdiri dari 7 (delapan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Berikut disampaikan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor pada tahun 2017 serta realisasi target kinerjanya:

**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (98,62%);
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (99,16%);
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor (98,73%);
4. Penyediaan alat tulis kantor (95,27%);
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (99,14%);
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (99,28%);
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (97,75%);
8. Penyediaan bahan logistik kantor (100%);
9. Penyediaan makanan dan minuman (99,83%);
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah (99,72%);
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (99,99%);
12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD (100%);
13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian (99,79%);
14. Penyediaan pengelolaan administrasi barang (100%);
15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor (99,83%).

**B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (95,88%);
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (99,98%);

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (96,27%);
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (98,89%);
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (98,61%);
6. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan komunikasi (99,78%).

**C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya (99,94%).

**D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (99,74%);
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (100,00%);

**E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (97,49%);
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (100,00%);
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (100,00%);
4. Penyusunan perencanaan anggaran (99,88%);
5. Penatausahaan keuangan SKPD (99,97%);
6. Penyusunan Renstra (98,95%);
7. Publikasi Kinerja SKPD (100%);
8. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (99,08%);
9. Penyusunan Renja (87,54%).

**F. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di Lingkup OPD (99,80%);
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (100,00%);
3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (99,05%);
4. Koordinasi Pengawasan komprehensif (97,36%);
5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (96,31%);
6. Review laporan keuangan pemerintah daerah (99,95%);
7. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa (99,67%);

8. Pelaksanaan Audit Khusus/Tematik (99,93%);
9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD (99,88%);
10. Pengawasan bantuan keuangan Kabupaten/Kota (Banprop) (98,40%)

**G. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (97,92%).

**H. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan**

1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (99,71%);
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Secara Online (82,59%).

**2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran yang ada di Inspektorat Kabupaten Bogor.

Adapun hasil evaluasi dan analisis kinerja capaian berdasarkan pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor pada tahun 2017, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan, yaitu:**

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dok	485	605	124,74
2.	Tindaklanjut Hasil Pengawasan	%	100,00	100,00	100,00
<b>Rata- rata</b>					<b>112,37</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan pada tahun 2017, sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (dokumen pengawasan) pada tahun 2017 di targetkan sebanyak 204 dokumen terealisasi

sebanyak 204 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah objek pemeriksaan, LHP dan rekomendasi pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sedangkan pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Bogor hanya melakukan pemeriksaan pada Pemerintahan Desa sebanyak 120 Desa/Kelurahan.

2. Jumlah Tindak lanjut hasil pengawasan pada tahun 2017 di targetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, dimana capaian pada tahun 2017 sebesar 100,00%.

Anggaran untuk mewujudkan sasaran kesatu mencapai sebesar Rp357.637.000,00 yang terealisasi sebesar Rp354.237.000,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,05%.

Sasaran Kesatu tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yaitu dianggarkan sebesar Rp7.701.359.000,00 terealisasi sebesar Rp7.669.702.300,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,59%.

**Sasaran 2: Meningkatkan Fungsi Peran Inspektorat Mewujudkan Good Government, yaitu:**

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB	Dok	1	1	100,00
2.	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dok	3	3	100,00
<b>Rata-rata</b>					<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis



Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan penjaminan Mutu pada tahun 2017, sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 dari target 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
2. Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan pada tahun 2016 dari target sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, dimana capaian pada tahun 2017 sebesar 100,00%.

Anggaran untuk mewujudkan sasaran kedua mencapai sebesar Rp1.371.983.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.359.045.949,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,06%.

Sasaran Kedua tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu :

1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan yaitu dianggarkan sebesar Rp1.371.983.000,00 terealisasi sebesar Rp1.359.045.949,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 99,06%.

**Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme serta Keterampilan Aparatur Pengawasan, yaitu:**

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Auditor	Orang	50	38	76,00
2.	Jumlah P2UPD	Orang	33	18	54,55
<b>Rata-rata</b>					<b>65,27</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan penjaminan Mutu pada tahun 2014, sebagai berikut :

1. Jumlah auditor pada tahun 2017 di targetkan sebanyak 50 orang terealisasi sebanyak 38 orang sehingga capaian kerjanya sebesar 76,00%. Capaian kinerja tahun 2017 lebih rendah sebesar 18,74% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang diusulkan

untuk mengikuti diklat jabatan fungsional Auditor. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah auditor di tahun 2017 telah tercapai sebanyak 38 orang dari target 50 orang atau telah tercapai sebesar 76,00%.

2. Jumlah P2UPD ditargetkan sebanyak 33 orang terealisasi sebanyak 18 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 54,55%. Capaian kinerja tahun 2017 lebih rendah sebesar 35,93% apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini terjadi karena terbatasnya tenaga yang profesional di bidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan fungsional P2UPD, dimana masih terdapat Peraturan yang belum disempurnakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah P2UPD telah tercapai sebanyak 18 orang dari target sebanyak 33 orang atau telah tercapai sebesar 54,55%.

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis Ketiga. Anggaran untuk mewujudkan sasaran ketiga mencapai sebesar Rp440.867.000,00 yang terealisasi sebesar Rp431.712.000,00. sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,92%.

Sasaran Ketiga tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yaitu dianggarkan sebesar Rp440.867.000,00 terealisasi sebesar Rp431.712.000,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,92%.

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pada Inspektorat atas kegiatan ini belum mencapai target yang diharapkan, dan hal ini harus menjadi dasar dan upaya perbaikan sehingga capaian jangka menengah Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dapat tercapai, mengingat tahun 2018 merupakan tahun terakhir atas Renstra Tahun 2013-2018.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Kondisi Internal

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Bogor menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor serta dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat dijabarkan melalui 2 (dua) kondisi, yaitu kondisi positif dan negatif sebagai berikut :

**Kondisi Positif**

- Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan;
- Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan;
- Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat;
- Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja;
- Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

**Kondisi Negatif**

- Hasil survei Peringkat Kemudahan Berbisnis oleh International Finance Corporation (IFC) pada tahun 2013 Indonesia berada pada peringkat ke 129 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu peringkat ke 126;
- Hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2013 IPK Indonesia sebesar 3.0 dari skala 10.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Secara umum program kegiatan pada tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD, sangat penting untuk diakomodir pada tahun 2017 agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal (lihat tabel 2.3 pada lampiran), yaitu:

1. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Penambahan Jumlah anggaran melalui penambahan jumlah Auditor dan Hari Kerja yang mengakomodir kegiatan tersebut untuk memaksimalkan terselesaikannya kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala di lingkup desa.  
Kebutuhan akan pengawasan yang lebih maksimal di lingkup desa melalui penambahan jumlah hari pemeriksaan di setiap pemeriksaan ke desa.
3. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik  
Sehubungan dengan memaksimalkan peran Inspektorat sebagai *Counseling partner* dan *Quality Assurance*, maka diperlukan peningkatan peran Inspektorat dalam Audit Dengan Tujuan Tertentu melalui Penambahan sub kegiatan Audit Tematik diantaranya, Audit Kinerja Puskesmas, Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri, Audit BOS, Audit Fasos dan Fasum, serta Audit Aset Daerah.

#### **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Pada tahun 2013 terdapat kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat yaitu evaluasi dana BOS, namun pada tahun 2014 dan 2015 kegiatan ini ditingkatkan menjadi Pemeriksaan/Audit Dana BOS untuk memaksimalkan tingkat pengawasan terhadap sekolah yang

menerima dana BOS. Lalu kegiatan ini bertujuan untuk memantau pengelolaan dana BOS, sehingga dapat diketahui peruntukan dana BOS yang sudah disalurkan ke sekolah-sekolah penerima, selain itu kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dari penggunaan dana BOS.

Selain itu pada tahun 2017 dilaksanakan kegiatan Audit Fasos dan Fasum serta Audit Aset Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK – RI guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Bogor.

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Inspektorat dalam menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dari nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaahan terdapat 4 (empat) kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan 1 (satu) kegiatan menjadi prioritas provinsi, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi**

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Kementrian PAN & RB	Proses Penyusunan Master Plan Reformasi Birokrasi
2	Monitoring Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi	Kementrian PAN & RB	
3	Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Itjen. Kemendagri	
4	Unit Pelaksana Integritas	Kementrian PAN & RB	
B	Provinsi		
1	Meningkatkan manfaat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ( <i>Counseling Partner</i> )	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Peningkatan pemahaman SDM Inspektorat

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN

#### 1. Tujuan

Untuk menjamin kesinambungan dan keberlangsungan program-program pengawasan tersebut, perlu disusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan uraian dari Renstra Inspektorat yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran selama periode waktu 5 (lima) tahun ke depan yang tujuannya



dicapai, berorientasi pada hasil serta dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa sekarang.

Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat dalam mewujudkan Good Government;
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2018 (lihat tabel 2.4 pada lampiran), adalah sebagai berikut:

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan bahan logistik kantor;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah;
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD;
13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian;
14. Penyediaan pengelolaan administrasi barang;
15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor.

#### **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan meubeler;



2. Pengadaan peralatan kantor;
3. Pengadaan perlengkapan kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
5. Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional;
6. Pemeliharaan ruti/berkala peralatan gedung kantor;
7. Pemeliharaan ruti/berkala taman halaman kantor;
8. Pemeliharaan ruti/berkala jaringan komputerisasi;

**C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

**D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4. Penyusunan perencanaan anggaran;
5. Penatausahaan keuangan SKPD;
6. Publikasi kinerja SKPD;
7. Penyusunan Renja SKPD;
8. Penyusunan Program Kerja Tahunan (PKPT).

**E. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup OPD;
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
4. Koordinasi pengawasan komprehensif;
5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
6. Review laporan keuangan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup desa;
8. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik.
9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD;

10. Bantuan operasional pemeriksaan bantuan hibah, bansos dan bantuan keuangan provinsi.

**F. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;

**G. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan**

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara online.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 di lingkup Inspektorat Kabupaten, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2018 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.

Dalam rangka mencapai target sebagai kabupaten termaju di Indonesia, isi Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2018 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Inspektorat Kabupaten, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2018 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Inspektorat Kabupaten.

Semoga Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2018 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2018. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : C I B I N O N G  
Tanggal : Februari 2018

**INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR**  
  
**Drs. BENNY DELYUZAR, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591119 198907 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR  
NOMOR : 700/131.1/SK-Inspektorat  
TANGGAL : 14 Februari 2018

**SUSUNAN TIM**  
**PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018**

---

Penanggung Jawab : Inspektur  
Ketua : Sekretaris Inspektorat;  
Wakil Ketua : Kasubag Program dan Pelaporan;  
Sekretaris : Pelaksana pada Subag Program dan Pelaporan;  
Anggota : 1. Inspektur Pembantu I;  
2. Inspektur Pembantu II;  
3. Inspektur Pembantu III;  
4. Inspektur Pembantu IV;  
5. Koordinator Fungsional;  
6. Unsur Pelaksana pada Subag Program dan Pelaporan;  
7. Unsur Pelaksana pada Subag Keuangan;  
8. Unsur Pelaksana pada Subag Umum dan Kepegawaian.

**Tabel 2.1**  
**EVALUASI HASIL RKPD 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2017**  
**KABUPATEN BOGOR**

**SKPD : INSPEKTORAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = Evkin Tri IV	11=(10/4)		
	URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN											
20	5	1	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>									
20	5	1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Materai buah	600 buah	500 buah	- buah	- buah	#DIV/0!	- buah	-	
20	5	1	2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air, listrik, dan internet	6 jaringan	6 jaringan	6 jaringan	6 jaringan	1	6 jaringan	2 jaringan	33,33
20	5	1	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK kendaraan unit/tahun	22 unit/tahun	22 unit/tahun	22 unit/tahun	22 unit/tahun	1	26 unit/tahun	3 unit/tahun	11,54
20	5	1	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan fasilitas kantor	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	1	6 orang	2 orang	33,33
20	5	1	10 Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	37 jenis	113 jenis	113 jenis	113 jenis	1	35 jenis	20 jenis	57,14
20	5	1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Barang cetakan dan penggadaan	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	1	12 jenis	9 jenis	75,00
20	5	1	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	1	10 jenis	0 jenis	0,00
20	5	1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar, Majalah, Buku Perundang-undangan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	1	10 jenis	1 jenis	10,00
20	5	1	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Tabung Gas Elpiji yang terisi Tabung Pemadam Kebakaran yang terisi	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	1	96 kali	15 kali	15,63
20	5	1	17 Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan makan dan minum untuk rapat dan tamu	12 kali	6 kali	6 kali	6 kali	1	12 kali	4 kali	33,33
20	5	1	18 Rapat-rapat koordinasi dan	Dokumen hasil rapat koordinasi	2 tujuan	2 tujuan	2 tujuan	2 tujuan	1	2 tujuan	1 tujuan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = Evkin Tri IV	11=(10/4)
		konsultasi ke dalam dan luar daerah								
		dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah								
20	5	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya honor bagi tenaga pendukung	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00
20	5	20	Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD	Dokumen akusisi	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
20	5	21	Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian	Dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00
20	5	22	Penyediaan pengelolaan administrasi barang	Dokumen pengelolaan administrasi barang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00
20	5	24	Penyediaan pelayanan keamanan	Tersedianya pegawai keamanan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00
20	5	2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>							
20	5	3	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung	0 Gedung	0 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	0 Gedung	#DIV/0!
20	5	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas	3 unit	- unit	- unit	- unit	#DIV/0!	0,00
20	5	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	3 unit	8 unit	8 unit	8 unit	1	0,00
20	5	10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur	90 unit	- unit	- unit	- unit	#DIV/0!	#DIV/0!
20	5	14	Pengadaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	3 unit	8 unit	8 unit	8 unit	1	0,00
20	5	21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	2 Gedung	1	0,00
20	5	23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas	22 unit/tahun	26 unit/tahun	26 unit/tahun	26 unit/tahun	1	0,00
20	5	29	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Peralatan kantor	2 jenis/tahun	6 jenis/tahun	2 jenis/tahun	2 jenis/tahun	1	0,00
20	5	30	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor	1 jenis/tahun	1 jenis/tahun	1 jenis/tahun	1 jenis/tahun	1	0,00
20	5	31	Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor	Pemeliharaan taman/halaman kantor	250 m2	1500 m2	1500 m2	1500 m2	1	0,00
20	5	33	Pemeliharaan Genset	unit/tahun	1 unit/tahun	1 unit/tahun	0 unit/tahun	0 unit/tahun	#DIV/0!	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = Evkin Tri IV	11=(10/4)			
20	5	3											
20	5	3	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Kartu Absensi	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!		
20	5	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	100 stel	103 stel	47 stel	143 stel	3,0425532	100 stel	0 stel	0,00
20	5	5											
20	5	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pengiriman peserta	8 orang	26 orang	26 orang	26 orang	1	12 orang	0 orang	0,00
20	5	5	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1	50 orang	0 orang	0,00
20	5	6											
20	5	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan penataan administrasi program dan pelaporan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	1 dok	50,00
20	5	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	1 dok	50,00
20	5	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	100,00
20	5	6	5	Penyusunan perencanaan anggaran	Dokumen anggaran	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	1 dok	50,00
20	5	6	6	Penatausahaan keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	100,00
20	5	6	7	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Dokumen perencanaan kerja	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	2 dok	100,00
20	5	6	13	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Kinerja Inspektorat di media	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1	1 tahun	0 tahun	0,00
20	5	6	14	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	100,00
20	5	20											
20	5	20	1	Pelaksanaan pengawasan	Hasil Pemeriksaan	365 dokumen	688 dokumen	688 dokumen	688 dokumen	1	803 dokumen	45 dokumen	5,60





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1				2				3		4			
5				6				7		8=(7/6)			
9				10 = Evkin Tri IV				11=(10/4)					
20	5	43	1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Pedoman pengawasan	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1	2 dokumen	0 dokumen	0,00
20	5	43	2	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara online	prosentase laporan	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	1 dokumen	0 dokumen	0,00











**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Bogor**

**SKPD : INSPEKTORAT**

No	Indikator	Kategori	Target Akhir Renstra (2018)		Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun 2017	Proyeksi			Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (Dok)		643	Dok.	523	523	643	643	643	523	320.900.000	204.600.000	5.245.949.300	
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)		100	%	100	100	100	100	100	100	7.832.139.864	11.949.913.000	354.237.000	
3	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB (Dok)		1	Dok.	1	1	1	1	1	1	138.758.108	65.685.000	42.939.000	
4	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dok)		2	Dok.	2	2	2	3	3	2	196.461.310	923.568.000	1.359.045.949	
5	Jumlah Auditor		50	Orang	38	41	44	38	38	41	297.907.122	127.642.258	269.783.153	
6	Jumlah P2UPD		33	Orang	21	18	18	18	18	18	130.788.493	65.377.741	157.921.846	



**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Bogor**

a

**SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cibinong</b>		1 Tahun	<b>1.784.352.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cibinong</b>		1 Tahun	<b>1.784.352.000</b>	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat	0 jenis materai	-	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat	0 jenis materai	-	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet	2 jaringan telepon 1 jaringan air 2 jaringan listrik 1 jaringan internet	190.744.000	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet	2 jaringan telepon 1 jaringan air 2 jaringan listrik 1 jaringan internet	190.744.000	
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4	6.258.000	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4	6.258.000	
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		- Jumlah petugas kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor	6 orang 14 jenis	144.963.000	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		- Jumlah petugas kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor	4 orang 15 jenis	144.963.000	
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	43 jenis	43.763.000	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	37 jenis	43.763.000	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	- Barang cetakan: - Penggandaan :	10 jenis 2 jenis	40.499.000	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	- Barang cetakan: - Penggandaan :	10 jenis 2 jenis	40.499.000
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	22.889.000	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	22.889.000	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	- Surat Kabar - Buku perundang-undangan	42.075.000	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	- Surat Kabar - Buku perundang-undangan	4 jenis 1 jenis	42.075.000
	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran - Jumlah isi ulang tabung gas	1 kali 120 kali	20.960.000	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran - Jumlah isi ulang tabung gas	1 kali 5 unit 96 kali	20.960.000	
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah jamuan makan dan minum	- Rapat : - Tamu :	45.750.000	10 Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah jamuan makan dan minum	- Rapat : - Tamu :	6 kali 6 kali	45.750.000
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	- Perjalanan Dalam Daerah	306.802.000	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	- Perjalanan Dalam Daerah	39 hari	306.802.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Perjalanan Luar Daerah	53 hari				- Perjalanan Luar Daerah	23 hari		
	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	4 orang	118.094.000	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	118.094.000	
	13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD		Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD	2 jenis dok	196.103.000	13 Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD		Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD	2 jenis dok	196.103.000	
	14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	7 jenis dok	381.904.000	14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	6 jenis dok	381.904.000	
	15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	4 jenis dok	124.008.000	15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	4 jenis dok	124.008.000	
	16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		Jumlah piket keamanan kantor	4 orang	99.540.000	16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		Jumlah piket keamanan kantor	4 orang	99.540.000	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>858.998.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>858.998.000</b>	
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan Dinas yang dibutuhkan	1 jenis	400.000.000	1 Kendaraan Dinas		Jumlah kendaraan Dinas yang dibutuhkan	3 jenis	400.000.000	
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara		134.925.000	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara		134.925.000	
			- Pemeliharaan Ruang Arsip	1 gedung				- Pemeliharaan Ruang Arsip	1 gedung		
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		- Jumlah kend. roda 4 yang dipelihara	14 unit	169.325.000	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		- Jumlah kend. roda 4 yang dipelihara	14 unit	169.325.000	
			- Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara	14 unit				- Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara	14 unit		
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2 jenis	58.334.000	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2 jenis	58.334.000	
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1 jenis	50.739.000	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1 jenis	50.739.000	
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor		Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	200 m2	-	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor		Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	200 m2	-	
	7 Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik dan komunikasi		Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	1 Jaringan	45.675.000	8 Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor		Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	1 Jaringan	45.675.000	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>75.750.000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>75.750.000</b>	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99 orang	75.750.000	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99 orang	75.750.000	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>				<b>67.720.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas</b>				<b>67.720.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Sumber Daya Aparatur</b>					<b>Sumber Daya Aparatur</b>					
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15 orang	19.000.000	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15 orang	19.000.000	
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-Jumlah peserta sosialisasi -Jumlah peserta Workshop PPG	80 orang 80 orang	48.720.000	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-Jumlah peserta sosialisasi -Jumlah peserta Workshop PPG	80 orang 80 orang	48.720.000	
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>1.017.584.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>1.017.584.000</b>	
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	2 jenis dok	237.214.000	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	2 jenis dok	237.214.000	
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	48.724.000	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	48.724.000	
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	47.650.000	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	47.650.000	
	4 Penyusunan Perencanaan Anggaran		- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2014	2 jenis dok 2 jenis dok	202.164.000	4 Penyusunan Perencanaan Anggaran		- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2014	2 jenis dok 2 jenis dok	202.164.000	
	5 Penatausahaan Keuangan SKPD		Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2017	1 jenis dok	364.822.000	5 Penatausahaan Keuangan SKPD		Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2017	1 jenis dok	364.822.000	
	6 Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	42.791.000	6 Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	42.791.000	
	7 Penyusunan Renja SKPD		Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	15.450.000	7 Penyusunan Renja SKPD		Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	15.450.000	
	8 Publikasi Kinerja SKPD		Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	37.000.000	8 Publikasi Kinerja SKPD		Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	37.000.000	
	9 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	21.769.000	9 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	21.769.000	
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>				<b>7.701.359.000</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>				<b>7.601.359.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup OPD		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal - LHA Reguler OPD - LHA/LHM Kaji uji - Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat - LHA Reguler Kecamatan	44 LHA 240 LHA/LHM 1 dok 40 LHA	4.386.159.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup OPD		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal - LHA Reguler OPD - LHA/LHM Kaji uji - Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat - LHA Reguler Kecamatan	44 LHA 240 LHA/LHM 1 dok 40 LHA	4.386.159.000	
2	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		Terselesaikannya kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100 %	400.913.000	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		Terselesaikannya kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100 %	400.913.000	
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan	4 jenis dok	357.637.000	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan	4 jenis dok	357.637.000	
4	Koordinasi Pengawasan Komprehensif		Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	2 jenis dok	185.986.000	Koordinasi Pengawasan Komprehensif		Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	2 jenis dok	185.986.000	
5	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah evaluasi temuan hasil pengawasan (Audit)	3 jenis dok	249.178.000	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah evaluasi temuan hasil pengawasan (Audit)	3 jenis dok	249.178.000	
6	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Lampiran Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 jenis dok	426.378.000	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Lampiran Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 jenis dok	426.378.000	
7	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa		Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa	1 dok	871.493.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa		Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa	1 dok	871.493.000	
8	Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD		Hasil Laporan Monitoring SKPD	6 jenis dok	300.052.000	Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD		Hasil Laporan Monitoring SKPD	6 jenis dok	300.052.000	
9	Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik		Jumlah Pengawasan/Audit Tematik - Audit Kinerja Puskesmas - Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri - Audit BOS - Audit Fasos dan Fasum - Audit Aset Daerah	20 LHA 20 LHA 20 LHA 20 LHA 20 LHA	423.563.000	Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik		Jumlah Pengawasan/Audit Tematik - Audit Kinerja Puskesmas - Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri - Audit BOS - Audit Fasos dan Fasum - Audit Aset Daerah	20 LHA 20 LHA 20 LHA 20 LHA 20 LHA	423.563.000	
10	Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kabupaten/Kota (Banprov)				100.000.000						
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>				<b>440.867.000</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>				<b>464.867.000</b>	
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur		- Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri	70 orang	440.867.000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur		- Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri	70 orang	464.867.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan		- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	70 orang		Pengawasan		- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	70 orang		
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Review Pra RKA	70 orang				- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Analisis Pemecahan Masalah	70 orang		
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Keuangan	70 orang				- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Audit Khusus/Forensik	70 orang		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan		Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan		-	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan		Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan			-
			-Hammer Test	20 Unit				-Hammer Test	20 Unit		
			-Core Drilled Test	1 Unit				-Core Drilled Test	1 Unit		
			-Alat Uji Ketebalan	20 Unit				-Alat Uji Ketebalan	20 Unit		
			-Alat Ukur/Meteran	20 Unit				-Alat Ukur/Meteran	20 Unit		
			-Pakaian dan atribut penunjang pemeriksaan	50 setel				-Pakaian dan atribut penunjang pemeriksaan	50 setel		
<b>8</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan</b>				<b>1.371.983.000</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan</b>				<b>718.397.000</b>	
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Kebijakan Sistem operasional audit dan Prosedur penilaian raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja	3 jenis dok	1.319.994.000	1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Kebijakan Sistem operasional audit dan Prosedur penilaian raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja	3 jenis dok	666.408.000	
2	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)	1 dok	51.989.000	2 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)	1 dok	51.989.000	
					<b>13.318.613.000</b>					<b>12.589.027.000</b>	

**Tabel 2.4**  
**Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017**

**SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>	<b>Cibinong</b>		1 Tahun	<b>1.784.352.000</b>	<b>APBD II</b>	
	<b>Perkantoran</b>						
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat	0 jenis materai	-		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet	2 jaringan telepon 1 jaringan air 2 jaringan listrik 1 jaringan internet	190.744.000		
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	14 dok STNK Kendaraan Roda 2 14 dok STNK Kendaraan Roda 4	6.258.000		
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		-Jumlah petugas kebersihan -Jumlah alat kebersihan kantor	7 orang 14 jenis	144.963.000		
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	41 jenis	43.763.000		
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	-Barang cetakan: -Penggandaan :	7 jenis 2 jenis	40.499.000	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	22.889.000		
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	- Surat Kabar - Majalah - Buku perundang-undangan	1 jenis 1 jenis 1 jenis	42.075.000	
	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran - Jumlah isi ulang tabung gas	5 kali 120 kali	20.960.000		
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah jamuan makan dan minum	- Rapat : - Tamu :	24 kali 30 kali	45.750.000	
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	- Perjalanan Dalam Daerah - Perjalanan Luar Daerah	42 hari 53 hari	306.802.000	
	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	4 orang	118.094.000		
	13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD		Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD	4 jenis dok	196.103.000		
	14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	6 jenis dok	381.904.000		
	15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	3 jenis dok	124.008.000		
	16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		Jumlah piket keamanan kantor	4 orang	99.540.000		
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan</b>				<b>858.998.000</b>		
	<b>Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
	1 Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	3 jenis 6 unit	-		
	2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit	400.000.000		
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara	- Pemeliharaan Ruang Arsip	2 gedung	134.925.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona		Jumlah Kendaraan Dinas Yang dibutuhkan		169.325.000		
			-Kendaraan Roda 4	14 Unit			
			-Kendaraan Roda 2	14 Unit			
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2 jenis	58.334.000		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1 jenis	50.739.000		
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor		Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	200 m2	-		
8	Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor		Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	2 Gedung	45.675.000		
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>75.750.000</b>		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99 orang	75.750.000		
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>67.720.000</b>		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15 orang	19.000.000		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-Jumlah peserta sosialisasi	80 orang	48.720.000		
			-Jumlah peserta Workshop PPG	80 orang			
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>1.017.584.000</b>		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	2 jenis dok	237.214.000		
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	48.724.000		
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	47.650.000		
4	Penyusunan Perencanaan Anggaran		- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P	2 jenis dok	202.164.000		
			- Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2018	2 jenis dok			
5	Penatausahaan Keuangan SKPD		Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2016	1 jenis dok	364.822.000		
6	Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	42.791.000		
7	Penyusunan Renja SKPD		Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	15.450.000		
8	Publikasi Kinerja SKPD		Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	37.000.000		
9	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	21.769.000		
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>				<b>7.701.359.000</b>		
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup OPD		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal		4.386.159.000		
			- LHA Reguler OPD	44 LHA			
			- LHA/LHM Kaji uji	240 LHA/LHM			
			- Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat	1 dok			
			- LHA Reguler Kecamatan	40 LHA			
2	Penanganan Kasus		Terselesaikanya kasus pengaduan	100 %	400.913.000		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		dilingkungan Pemerintah Daerah				
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan	4 jenis dok	357.637.000		
4	Koordinasi Pengawasan Komprehensif		Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	1 jenis dok	185.986.000		
5	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah evaluasi temuan hasil pengawasan (Audit)	4 jenis dok	249.178.000		
6	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Lampiran Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 jenis dok	426.378.000		
7	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa		Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa	120 LHA Desa	871.493.000		
8	Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD		Hasil Laporan Monitoring SKPD	5 jenis dok	300.052.000		
9	Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik		Jumlah Pengawasan/Audit Tematik		423.563.000		
			- Audit Kinerja Puskesmas	20 LHA			
			- Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri	20 LHA			
			- Audit BOS	20 LHA			
			-Audit Fasos dan Fasum	20 LHA			
			-Audit Aset Daerah	20 LHA			
10	Penguatan Pengawasan Pembangunan Di Kabupaten/Kota (Banprov)				100.000.000		
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>				<b>440.867.000</b>		
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		- Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri	70 orang	440.867.000		
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	70 orang			
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Analisis Pemecahan Masalah	70 orang			
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Audit Khusus/Forensik	70 orang			
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Satgas SPIP	70 orang			
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan		Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan		-		
			-Hammer Test	70 Unit			
			-Core Drilled Test	1 Unit			
			-Alat Uji Ketebalan	20 Unit			
			-Alat Ukur/Meteran	20 Unit			
			-Pakaian dan atribut penunjang pemeriksaan	50 setel			
<b>8</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan</b>				<b>1.371.983.000</b>		
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Kebijakan Sistem operasional audit dan Prosedur penilaian raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja	2 jenis dok	1.319.994.000		
2	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)	100 %	51.989.000		
					<b>13.318.613.000</b>		





**Tabel 3.1**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017**  
**Kabupaten Bogor**

**SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR**

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Nasional</b>		
	1 Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Kementrian PAN & RB	a Permenpan No 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi
	2 Monitoring Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi	Perpres	a Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Thn 2012-2025 dan Jangka Menengah Thn 2012-2014
<b>B</b>	<b>Provinsi</b>		
	1 Meningkatkan manfaat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ( <i>Counseling Partner</i> )	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	a Peningkatan pemahaman SDM Inspektorat

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018**

**SKPI : INSPEKTORAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif					Prakiraan Maju (2018)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain - Lain	Total Anggaran			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>URUSAN WAJIB</b>	Pemantapan	Pemantapan	Cibinong														
	<b>BIDANG URUSAN</b>	Kinerja	manajemen															
	<b>OTONOMI DAERAH,</b>	Pelayanan	pemerintahan															
	<b>PEMERINTAHAN UMUM,</b>	Pemerintah yang																
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN</b>	Akuntabel																
	<b>DAERAH, PERANGKAT</b>																	
	<b>DAERAH, KEPEGAWAIAN</b>																	
	<b>DAN PERSANDIAN</b>																	
1	20	1			Meningkatnya kinerja pelayanan	100%		1 Tahun					1.792.298.000		1.792.298.000	2.236.916.800		Inspektorat
1	20	1	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat	0 jenis materai	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	0%			-		-	-	Sedang	Berjalan
1	20	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet	2 jaringan telepon 1 jaringan air 2 jaringan listrik 1 jaringan internet	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			190.744.000		190.744.000	296.500.000	Sedang	Berjalan
1	20	1	6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	14 dok STNK Kendaraan Roda 2 14 dok STNK Kendaraan Roda 4	Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/operasional	100%			6.258.000		6.258.000	24.146.000	Sedang	Berjalan
1	20	1	8		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		- Jumlah petugas kebersihan - Jumlah alat kebersihan kantor	6 orang 14 jenis	Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja dilingkungan kantor	100%			144.963.000		144.963.000	168.240.800	Sedang	Berjalan
1	20	1	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	43 jenis	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			43.763.000		43.763.000	75.000.000	Sedang	Berjalan
1	20	1	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	10 jenis barang cetakan: 2 jenis Penggandaan :	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			40.499.000		40.499.000	75.720.000	Sedang	Berjalan
1	20	1	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			22.889.000		22.889.000	26.000.000	Sedang	Berjalan
1	20	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 jenis Surat Kabar 1 jenis Majalah 1 jenis Buku perundang-undangan	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			42.075.000		42.075.000	65.892.000	Sedang	Berjalan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif					Prakiraan Maju (2018)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain - Lain	Total Anggaran			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	20 2 21						Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara		Terjaganya kondisi fisik gedung kantor sehingga dapat berfungsi	100%			136.325.000		136.325.000	100.000.000	Sedang	
							- Pemeliharaan Ruang Arsip	1 gedung	secara optimal								Berjalan	
1	20 2 23						- Jumlah kend. roda 4 yang dipelihara	12 unit	Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional	100%			169.325.000		169.325.000	160.915.000	Sedang	
							- Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara	11 unit									Berjalan	
1	20 2 25						- Jumlah Genset yang dipelihara	1 unit	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			-		-	-	Sedang	
1	20 2 29						Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2 jenis	terjaganya kondisi peralatan kantor	100%			58.334.000		58.334.000	55.423.000	Sedang	
																	Berjalan	
1	20 2 30						Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1 jenis	Terjaganya kondisi perlengkapan kantor	100%			50.739.000		50.739.000	45.164.000	Sedang	
																	Berjalan	
1	20 2 31						Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	250 m2	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			-		-	-	Sedang	
																	Berjalan	
1	20 2 32						Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	2 Gedung	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	100%			45.875.000		45.875.000	90.500.000	Sedang	
																	Berjalan	
<b>1</b>	<b>20 3</b>						<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>						<b>75.750.000</b>		<b>75.750.000</b>	<b>77.150.000</b>		Inspektorat
1	20 3 1						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99 orang			75.750.000		75.750.000	77.150.000	Sedang	
																	Berjalan	
<b>1</b>	<b>20 5</b>						<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur	100%			<b>61.720.000</b>		<b>61.720.000</b>	<b>155.751.000</b>		Inspektorat
1	20 5 1						Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15 orang			13.000.000		13.000.000	100.409.000	Sedang	
																	Berjalan	
1	20 5 2						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi Per UU	80 orang			48.720.000		48.720.000	55.342.000	Sedang	
																	Berjalan	
<b>1</b>	<b>20 6</b>						<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja SKPD	100%			<b>1.047.225.000</b>		<b>1.047.225.000</b>	<b>1.243.275.000</b>		Inspektorat
1	20 6 1						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	3 jenis dok			252.314.000		252.314.000	375.258.000	Sedang	
																	Berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif					Prakiraan Maju (2018)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain - Lain	Total Anggaran			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	20	6	2				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan semesteran SKPD	100%			50.274.000		50.274.000	55.873.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	4				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%			50.750.000		50.750.000	50.976.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	5				- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P	2 jenis dok	Terarahnya perencanaan anggaran perubahan tahun 2014 dan dan RKA SKPD Tahun 2014	100%			194.364.000		194.364.000	200.220.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	6				Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012	1 jenis dok	Terwujudnya administrasi keuangan SKPD	100%			373.222.000		373.222.000	415.328.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	7				Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	Terarahnya rencana strategis SKPD	100%			47.266.000		47.266.000	39.000.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	8				Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	Terarahnya rencana kerja SKPD	100%			16.350.000		16.350.000	25.500.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	13				Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	Tersampainya informasi kinerja SKPD kepada masyarakat luas	100%			37.000.000		37.000.000	48.100.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	14				Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	Terwujudnya rencana kerja pengawasan tahunan	100%			25.685.000		25.685.000	33.020.000	Sedang	Berjalan
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>				Meningkatkan \$ 100%						<b>7.640.808.000</b>		<b>7.640.808.000</b>	<b>13.238.331.000</b>		Inspektorat
1	20	20	1				Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal		Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal	100%			4.253.134.000		4.253.134.000	7.186.838.000	Sedang	Berjalan
							- LHA Reguler OPD	44 LHA										
							- LHA/LHM Kaji uji	240 LHA/LHM										
							- Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat	1 dok										
							- LHA Reguler Kecamatan	40 LHA										
1	20	20	2				Terselesaikannya kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100 %	Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal	100%			417.513.000		417.513.000	530.528.000	Sedang	Berjalan
1	20	20	6				Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan	5 jenis dok	Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal	100%			359.537.000		359.537.000	584.116.000	Sedang	Berjalan
1	20	20	7				Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	1 jenis dok	Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal	100%			189.086.000		189.086.000	250.657.000	Sedang	Berjalan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif					Prakiraan Maju (2018)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain - Lain	Total Anggaran			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	20 43				Meningkatnya d	100%							719.947.000		719.947.000	755.570.000		Inspektorat
					Penyempurnaan Kebijakan	sempurnanya												
					kebijakan sistem													
1	20 43 3				Penyusunan Kebijakan Sistem	prosedur	Kebijakan Sistem operasional audit dan	3 jenis dok	Terusunya Kebijakan Sistem da	100%			666.408.000		666.408.000	650.511.000	Sedang	
					dan Prosedur Pengawasan	pengawasan	Prosedur penilaian raport kinerja		Prosedur pengawasan								Berjalan	
							Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos											
							Kerja dan Kepuasan Kerja											
1	20 43 4				Pelaksanaan Penilaian Mandiri		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan	100 %	Tersusunnya laporan PMRB	100%			53.539.000		53.539.000	105.059.000	Sedang	
					Reformasi Birokrasi secara Online		Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)										Berjalan	
<b>JUMLAH</b>													<b>12.263.213.000</b>		<b>12.263.213.000</b>	<b>18.549.045.800</b>		

















# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Indah No. 1 Telp. (021) 875 6565 Cibinong 16914  
www.inspektorat.bogorkab.go.id | e-mail : inspektorat@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR : 700/131.1/SK - INSPEKTORAT**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-SKPD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2018.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Nomor 25 Seri E);
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
  - j. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 10);
  - k. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/75/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017.



## **Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Tahun 2017.
- (2) Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:
  - a. Penyusunan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2018;
  - b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bogor.

## **Pasal 2**

Sistematika Renja Inspektorat Kabupaten Bogor terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU  
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN  
BAB IV : PENUTUP

## **Pasal 3**

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **Pasal 4**

Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : C I B I N O N G

Tanggal : 14 Februari 2018

**INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR**



**Drs. BENNY DELYUZAR, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591119 198907 1 001